

MEMBEKALI WARGA NEGARA DI ERA *POST-TRUTH*: PERAN KRUSIAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI AUSTRALIA

Rike Erlande^{1*}, Kokom Komalasari², Ryan Taufika³, Mirza Hardian⁴, Ahmad Fauzan⁵
Apriya Maharani⁶, Mitra Permatasari⁷

^{1*} Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Palembang

^{2,6,7} Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

³ Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara

⁴ Universitas Riau, Riau

⁵ Universitas Mataram, NTB

*Rikeerlande@uniski.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: November 21, 2023

Accepted: February 11, 2024

Published: March 18, 2024

Keywords:

Pendidikan Kewarganegaraan; Era *Post-Truth*; Keterampilan Berpikir Kritis

ABSTRACT

This research aims to equip citizens with skills to face the challenges of the current post-truth era in Australia, Civics Education (Civic Social Studies) plays an important role. The research method uses a qualitative approach with descriptive analysis and literature review. Data was collected through a comprehensive literature review, including journal articles, books and reports relevant to the topic of Citizenship Education and the Post-Truth era. The research results show that Civics Social Studies in Australia aims to develop active, involved and responsible citizens, with an emphasis on critical thinking skills, media literacy and resistance to misleading information. The research conclusion is that the current Post-Truth era creates challenges for democracy and public discourse with increasing misleading information, the influence of emotions in decision making, and decreasing trust in traditional authorities. The crucial role of citizenship education is very necessary in Australia in responding to the urgency of this situation. Despite the challenges of limited time and resources, resistance to change in teaching practices, and the complexity of contemporary issues faced, several opportunities to strengthen include collaboration between schools, communities and other stakeholders, the use of technology and digital platforms in learning, and ongoing professional development for teachers as a key strategy to strengthen citizenship education.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membekali warga negara dengan keterampilan dalam menghadapi tantangan era *post-truth* saat ini

di Australia, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civics Social Studies*) memainkan peran penting. Metode penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif serta tinjauan literatur. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur yang komprehensif, meliputi artikel jurnal, buku, dan laporan yang relevan dengan topik Pendidikan Kewarganegaraan dan era *Post-Truth*. Hasil penelitian menunjukkan *Civics Social Studies* di Australia bertujuan untuk mengembangkan warga negara yang aktif, terlibat, dan bertanggung jawab, dengan penekanan pada keterampilan berpikir kritis, literasi media, serta ketahanan terhadap informasi yang menyesatkan. Simpulan penelitian, saat ini era *Post-Truth* menciptakan tantangan bagi demokrasi dan diskursus publik dengan meningkatnya informasi yang menyesatkan, pengaruh emosi dalam pengambilan keputusan, dan menurunnya kepercayaan terhadap otoritas tradisional. Peran krusial pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan di Australia dalam menanggapi urgensi situasi tersebut. Meskipun terdapat tantangan pada keterbatasan waktu dan sumber daya, resistensi terhadap perubahan dalam praktik pengajaran, dan kompleksitas isu-isu kontemporer yang dihadapi, beberapa peluang untuk memperkuat diantaranya kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pembelajaran, serta pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru sebagai strategi kunci untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan.

Corresponding Author:

Rike Erlande

Rikeerlande@uniski.ac.id

PENDAHULUAN

Di era *post-truth* saat ini, di mana batas antara kebenaran dan kebohongan menjadi suatu hal yang semakin kabur atau dengan istilah lain tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Pendidikan kewarganegaraan menghadapi sebuah tantangan yang semakin kompleks dalam membekali warga negara dengan keterampilan dan perspektif yang diperlukan untuk bernavigasi dalam lanskap memperoleh informasi yang membingungkan (Erlande & Chotimah, 2023). Perlu diciptakan konsep baru pendidikan kewarganegaraan secara efektif untuk menjadi warga negara yang aktif di abad 21, pengetahuan yang mendasari konsep harus berpindah dari pengetahuan akademis konvensional ke pengetahuan akademis transformatif (Banks, 2008:135; Istianah & Komalasari, 2023:102).

Era *post-truth* yang ditandai dengan meningkatnya penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, seringkali didorong oleh kemajuan teknologi digital dan media sosial yang memungkinkan informasi tersebar secara cepat dan luas tanpa melalui proses verifikasi yang memadai (Ghosh & Jing, 2020). Dalam lingkungan seperti ini, emosi dan keyakinan pribadi seringkali lebih diprioritaskan daripada fakta objektif dalam membentuk opini publik, yang menimbulkan ancaman serius terhadap demokrasi dan

kohesi sosial. Pendidikan menjadi salah satu senjata untuk membentuk lingkungan yang baik, melalui pendidikan merupakan salah satu hal dalam mengarahkan suatu perubahan bagi bangsa untuk menuju ke yang lebih baik (Jannah & Sulianti, 2021).

Fenomena *post-truth* berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari diskursus politik hingga pengambilan keputusan pribadi. Dalam konteks politik, era *post-truth* telah mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis, seperti media arus utama dan lembaga pemerintahan, yang seringkali dituduh menyebarkan "*hoax*" atau informasi yang bias (Buchanan & Kaye, 2022). Hal ini dapat menyebabkan polarisasi politik yang semakin meningkat, di mana kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda semakin sulit untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif dan mencapai konsensus. Selain itu, era *post-truth* juga menimbulkan tantangan dalam proses pemilihan umum, di mana penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dapat mempengaruhi pilihan pemilih dan melemahkan integritas demokrasi.

Dampak era *post-truth* juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan banyaknya informasi yang tersedia di internet dan media sosial, individu seringkali kesulitan untuk membedakan antara fakta dan fiksi, serta rentan terhadap manipulasi emosional dan psikologis. Hal ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat, baik dalam konteks pribadi maupun profesional, serta meningkatkan risiko terjadinya konflik sosial akibat perbedaan persepsi dan keyakinan yang didasarkan pada informasi yang salah. Menurut Erlande & Sapriya (2022); Murdiono et al., (2020) pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya mengubah gaya hidup tetapi juga dunia pendidikan.

Menghadapi tantangan era *post-truth* saat ini, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran yang semakin penting dalam membekali warga negara dengan keterampilan dan perspektif yang diperlukan untuk bernavigasi dalam lanskap informasi yang kompleks. Pendidikan kewarganegaraan, yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat demokratis (Henderson & Tudball, 2019), harus beradaptasi dengan realitas baru ini. Keterampilan seperti pemikiran kritis, literasi media, dan kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi menjadi semakin penting untuk dikuasai oleh setiap warga negara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan global juga penting dan memiliki peran dalam mempersiapkan individu menghadapi tantangan. Diperlukan strategi seperti meningkatkan kesadaran dan advokasi, memberikan pelatihan dan kapasitas, reformasi kurikulum, membuat kemitraan dan jaringan, serta memanfaatkan teknologi (Mulyani et al., 2024).

Peran Pendidikan Kewarganegaraan atau yang disebut *Civics Social Studies* di Australia dalam konteks ini, memikul tanggung jawab yang besar dalam mempersiapkan warga negara untuk menghadapi tantangan era *post-truth* (Erlande, 2022). Di Australia, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam

masyarakat demokratis (Henderson & Tudball, 2019). Kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Australia menekankan pada pengembangan kompetensi inti, seperti pemikiran kritis, literasi media, dan keterampilan komunikasi, yang diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran.

Strategi Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Era *post-truth* untuk membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi era *post-truth*, pendekatan pengajaran pendidikan kewarganegaraan perlu beradaptasi. Pengembangan keterampilan berpikir kritis menjadi prioritas utama, dengan siswa diajarkan cara mengevaluasi sumber informasi, menganalisis argumen dan bukti secara kritis, serta terlibat dalam diskusi yang mendalam dan reflektif (Heggart, 2021). Selain itu, mempromosikan literasi media dan digital juga menjadi penting, dengan siswa diajarkan cara mengidentifikasi berita palsu dan informasi yang menyesatkan, menggunakan sumber informasi yang kredibel, serta menafsirkan dan membuat konten media secara bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan juga harus menumbuhkan empati dan apresiasi terhadap keragaman perspektif. Dengan mengekspos siswa pada berbagai sudut pandang dan pengalaman, mendorong dialog yang terbuka dan saling menghormati, serta mempromosikan pemahaman antarbudaya, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mengurangi polarisasi dan membangun kohesi sosial (Peterson & Bentley, 2020).

Tantangan dan Peluang dalam Implementasi meskipun pentingnya *Civics Social Studies* dalam era *post-truth* semakin diakui, penerapannya di Australia tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan waktu dan sumber daya, resistensi terhadap perubahan dalam praktik pengajaran, serta kompleksitas isu-isu kontemporer yang dihadapi dapat menghambat implementasi yang efektif (Buchanan & Kaye, 2022). Namun, ada juga peluang untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan, seperti melalui kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru. Rusniati (2015) & Permatasari et al., (2024) menyatakan bahwa dalam kemajuan dunia global, etika dan moral menjadi salah satu tantangan terbesar, secara global kita hidup di dunia yang sangat kompleks dan saling berhubungan.

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran yang krusial dalam membekali warga negara dengan keterampilan, pengetahuan, dan perspektif yang diperlukan untuk bernavigasi dalam lanskap informasi yang kompleks. Di Australia, upaya untuk memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan (*Civics Social Studies*) terus dilakukan, dengan penekanan pada pengembangan pemikiran kritis, literasi media, dan apresiasi terhadap keragaman. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, komitmen yang berkelanjutan untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk warga negara yang terdidik, terlibat, dan tangguh dalam menghadapi realitas era *post-truth*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode tersebut untuk menggambarkan fenomena dengan apa adanya dan menjelaskan karakteristik populasi tertentu yang kemudian disajikan dengan akurat dan benar. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur yang komprehensif, meliputi artikel jurnal, buku, dan laporan yang relevan dengan topik pendidikan kewarganegaraan dan era *post-truth*. Pencarian literatur dilakukan menggunakan database akademik seperti *ERIC*, *JSTOR*, dan *Google Scholar*, dengan menggunakan kata kunci seperti "pendidikan kewarganegaraan," "era post-truth" "keterampilan berpikir kritis" dan "literasi media" Kriteria inklusi untuk sumber yang ditinjau meliputi relevansi dengan topik penelitian, publikasi dalam 10 tahun terakhir (2013-2023), dan kualitas sumber yang dinilai berdasarkan reputasi penerbit dan sistem *peer-review*. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan tren yang muncul dari sumber-sumber yang ditinjau. Temuan kemudian disintesis dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan wawasan tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan era *post-truth* di Australia. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori pedagogi kritis (Giroux, 2021) dan konsep literasi media (Buckingham, 2019). Teori pedagogi kritis menekankan pentingnya pendidikan dalam memberdayakan warga negara untuk berpikir kritis, mempertanyakan struktur kekuasaan, dan terlibat aktif dalam transformasi sosial. Konsep literasi media menekankan pentingnya kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat konten media dalam berbagai konteks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Era *Post-Truth* dan Tantangannya

Era *post-truth*, sebuah istilah yang semakin sering digunakan dalam beberapa tahun terakhir, menggambarkan fenomena di mana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan daya tarik emosional dan keyakinan pribadi (Ghosh & Jing, 2020). Dalam era ini, kebenaran seringkali dianggap sebagai konsep yang relatif dan subjektif, di mana individu cenderung memilih "kebenaran" yang sesuai dengan pandangan dunia dan kepentingan mereka sendiri, terlepas dari bukti yang ada. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi digital, meningkatnya polarisasi politik, dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tradisional.

Salah satu karakteristik utama era *post-truth* adalah meningkatnya penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, seringkali melalui media sosial dan platform digital lainnya. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi di era digital telah menciptakan lingkungan di mana berita palsu, teori konspirasi, dan informasi yang menyesatkan dapat menyebar secara viral dalam hitungan jam atau bahkan menit (Buchanan & Kaye, 2022). Algoritma media sosial, yang dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan perilaku pengguna, juga dapat memperkuat "*gelembung filter*" di mana individu terus-menerus terekspos pada informasi yang

menegaskan pandangan mereka, sambil mengisolasi mereka dari perspektif yang berbeda.

Era *post-truth* emosi dan keyakinan pribadi seringkali memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan fakta dan alasan. Individu cenderung mencari informasi yang mengonfirmasi keyakinan mereka yang sudah ada sebelumnya (*bias konfirmasi*) dan menolak informasi yang bertentangan dengan pandangan mereka (*disonansi kognitif*). Akibatnya, diskusi publik seringkali didominasi oleh retorika yang provokatif dan polarisasi, di mana kelompok dengan pandangan yang berbeda semakin sulit untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif dan berbasis fakta.

Fenomena *post-truth* juga ditandai dengan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga dan otoritas tradisional, seperti media arus utama, lembaga akademik, dan lembaga pemerintahan. Dalam iklim ketidakpercayaan ini, individu cenderung mencari sumber informasi alternatif yang sesuai dengan pandangan mereka, termasuk situs *web* partisan, forum *online*, dan *influencer media sosial* (Heggart, 2021). Hal ini dapat memperdalam polarisasi dan mempersulit upaya untuk membangun konsensus dan pemahaman bersama tentang isu-isu penting.

Dampak era *post-truth* terhadap demokrasi sangat mengkhawatirkan. Ketika diskursus publik semakin didominasi oleh emosi dan keyakinan pribadi daripada fakta dan alasan, kualitas debat politik dan pengambilan keputusan dapat menurun secara signifikan. Polarisasi politik yang semakin meningkat dapat menyebabkan kebuntuan politik dan melemahkan kemampuan lembaga-lembaga demokratis untuk mengatasi masalah-masalah mendesak (Henderson & Tudball, 2019). Selain itu, penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan selama periode pemilihan dapat mempengaruhi pilihan pemilih dan melemahkan integritas proses demokrasi.

Menghadapi tantangan era *post-truth*, pendidikan memainkan peran yang sangat penting. Sistem pendidikan harus beradaptasi untuk membekali siswa dengan keterampilan dan perspektif yang diperlukan untuk bernavigasi dalam lingkungan informasi yang kompleks dan sering kali membingungkan ini. Pendidikan kewarganegaraan, secara khusus, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan warga negara yang terdidik, terlibat, dan tangguh dalam menghadapi tantangan era *post-truth* (Peterson & Bentley, 2020).

Upaya untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan dalam konteks ini juga menghadapi berbagai tantangan. Pendidik harus terus beradaptasi dengan lanskap informasi yang terus berubah dan perkembangan teknologi yang pesat, sambil juga mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam praktik pengajaran dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, kompleksitas isu-isu kontemporer yang dihadapi, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan globalisasi, menuntut pendekatan pengajaran yang inovatif dan responsif.

Meskipun demikian, potensi pendidikan kewarganegaraan dalam membekali warga negara di era *post-truth* tidak dapat diabaikan. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, literasi media, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat,

pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan peran kunci dalam membentuk warga negara yang mampu menghadapi tantangan era *post-truth* dengan kepercayaan diri, ketahanan, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokratis. Dalam bagian selanjutnya, kita akan mengeksplorasi strategi dan pendekatan spesifik yang dapat digunakan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tujuan ini.

2. Peran *Civics Social Studies* di Australia

Pendidikan kewarganegaraan (*Civics Social Studies*) memainkan peran yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam masyarakat demokratis. Di Australia, pentingnya pendidikan kewarganegaraan semakin diakui, terutama dalam konteks tantangan yang ditimbulkan oleh era *post-truth*. Hal ini akan mengeksplorasi tujuan dan sasaran pendidikan kewarganegaraan di Australia, serta menganalisis kurikulum dan pendekatan pengajaran yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan utama *Civics Social Studies* di Australia adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif, terlibat, dan bertanggung jawab. Hal ini meliputi pemahaman tentang sistem politik dan pemerintahan Australia, hak dan tanggung jawab warga negara, serta nilai-nilai demokratis seperti kesetaraan, keadilan, dan kebebasan (Heggart, 2021). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk mempromosikan partisipasi aktif dalam masyarakat, baik melalui keterlibatan politik, kegiatan sukarela, maupun kontribusi terhadap komunitas lokal.

Berdasarkan konteks era *post-truth*, *Civics Social Studies* di Australia semakin menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan literasi media. Siswa didorong untuk mengevaluasi sumber informasi secara kritis, menganalisis argumen dan bukti, serta membedakan antara fakta dan opini (Peterson & Bentley, 2020). Keterampilan ini sangat penting untuk membangun ketahanan terhadap informasi yang salah atau menyesatkan, serta untuk berpartisipasi dalam diskusi publik yang berbasis fakta dan alasan. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Australia dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan ini melalui berbagai mata pelajaran dan pendekatan pengajaran. Pernyataan Bahrudin (2019) & Permatasari et al., (2023) keberadaan suatu kurikulum memerlukan sebuah rancangan. Dalam Kurikulum Australia, pendidikan kewarganegaraan diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, seperti Ilmu Sosial dan Humaniora, Bahasa Inggris, dan Teknologi (Henderson & Tudball, 2019). Integrasi ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang holistik tentang isu-isu kewarganegaraan dan menerapkan keterampilan yang relevan dalam berbagai konteks.

Salah satu aspek penting dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Australia adalah penekanan pada pengembangan kompetensi inti, seperti pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Kompetensi ini dianggap sebagai keterampilan yang sangat penting untuk menghadapi tantangan abad ke-21, termasuk era *post-truth* (Buchanan & Kaye, 2022). Dengan mengembangkan kompetensi ini, siswa diharapkan

dapat menjadi pembelajar seumur hidup yang mampu beradaptasi dengan perubahan, mengatasi masalah kompleks, dan berkontribusi secara positif terhadap masyarakat.

Pendekatan pengajaran dalam pendidikan kewarganegaraan di Australia juga menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan partisipatif. Siswa didorong untuk terlibat dalam diskusi, debat, dan proyek-proyek kolaboratif yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi isu-isu kewarganegaraan secara mendalam dan mengembangkan keterampilan yang relevan (Ghosh & Jing, 2020). Pendekatan ini juga membantu siswa untuk mengembangkan empati, menghormati keragaman, dan memahami perspektif yang berbeda, yang sangat penting dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan terhubung secara global. Meskipun demikian, implementasi pendidikan kewarganegaraan yang efektif di Australia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu dan sumber daya, mengingat padatnya kurikulum sekolah dan tuntutan yang bersaing dari berbagai mata pelajaran (Peterson & Bentley, 2020). Selain itu, pendidik juga harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengikuti perkembangan teknologi dan tren sosial yang pesat, serta untuk mengatasi isu-isu kontemporer yang kompleks.

Namun, terlepas dari tantangan-tantangan ini, potensi pendidikan kewarganegaraan dalam membekali warga negara di era *post-truth* tetap signifikan. Dengan dukungan yang memadai dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat luas, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi alat yang *powerful* untuk mengembangkan warga negara yang terdidik, terlibat, dan tangguh dalam menghadapi realitas era *post-truth*. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta komitmen terhadap pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru merupakan beberapa strategi kunci untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan di Australia. Selanjutnya, akan mengeksplorasi secara lebih rinci strategi dan pendekatan spesifik yang dapat diterapkan dalam pengajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan keterampilan dan perspektif yang diperlukan dalam menghadapi tantangan era *post-truth*. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik-praktik terbaik dalam pendidikan kewarganegaraan, dapat berkontribusi terhadap pembentukan warga negara yang mampu navigasi dalam lanskap informasi yang kompleks dan terlibat secara konstruktif dalam masyarakat demokratis.

3. Strategi Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Era *Post-Truth*

Menghadapi tantangan era *post-truth*, pendekatan pengajaran dalam pendidikan kewarganegaraan perlu beradaptasi untuk membekali siswa dengan keterampilan dan perspektif yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang terdidik, terlibat, dan tangguh.



Gambar 1. Strategi dan praktik pengajaran yang dapat diterapkan untuk mengembangkan keterampilan Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Era *Post-Truth*. Sumber: dikembangkan oleh penulis (2024)

A. Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis

Salah satu keterampilan inti yang harus dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan di era *post-truth* adalah kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis melibatkan analisis yang cermat terhadap informasi, argumen, dan bukti, serta kemampuan untuk mengevaluasi keandalan dan relevansi sumber informasi (Heggart, 2021). Untuk mengembangkan keterampilan ini, guru dapat menerapkan berbagai strategi seperti:

1. Mengajarkan cara mengevaluasi sumber informasi: Siswa perlu dibekali dengan alat dan kriteria untuk menilai kredibilitas sumber informasi, seperti mempertimbangkan reputasi penulis atau organisasi, memeriksa tanggal publikasi, dan mengidentifikasi potensi bias atau konflik kepentingan. Latihan praktis, seperti analisis artikel berita atau situs web, dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan ini.
2. Mendorong analisis kritis terhadap argumen dan bukti: Guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk secara kritis menganalisis argumen dan bukti yang disajikan dalam berbagai bentuk media, seperti pidato politik, iklan kampanye, atau posting media sosial. Siswa dapat diminta untuk mengidentifikasi premis, mengevaluasi logika, dan mempertanyakan asumsi yang mendasari argumen tersebut.
3. Memfasilitasi diskusi yang mendalam dan reflektif: Diskusi kelas yang mendalam dan reflektif dapat membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis dengan mengekspos mereka pada berbagai perspektif dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan sudut pandang alternatif. Guru dapat menggunakan teknik seperti *Socratic Seminar* atau debat terstruktur untuk memfasilitasi pertukaran ide yang bermakna dan berbasis bukti.

B. Mempromosikan Literasi Media dan Digital

Di era *post-truth*, di mana banyak informasi disebarluaskan melalui *platform digital*, mengembangkan literasi media dan digital menjadi semakin penting. Literasi media melibatkan kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat konten media dalam berbagai bentuk (Buchanan & Kaye, 2022). Beberapa strategi untuk mempromosikan literasi media dalam pendidikan kewarganegaraan meliputi:

1. Mengajarkan cara mengidentifikasi berita palsu dan informasi yang menyesatkan: Siswa perlu dibekali dengan keterampilan untuk mengenali ciri-ciri berita palsu, seperti judul yang sensasional, kurangnya sumber yang dapat diverifikasi, atau inkonsistensi logis dalam cerita. Kegiatan praktis, seperti "*spot the fake news challenge*" atau analisis komparatif artikel dari berbagai sumber, dapat membantu mengasah keterampilan ini.
2. Mendorong penggunaan sumber informasi yang kredibel: Guru dapat membimbing siswa dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber informasi yang kredibel, seperti publikasi akademik, organisasi *fact-checking*, atau media arus utama yang memiliki reputasi baik. Mengembangkan kebiasaan untuk melakukan *cross-check* informasi dari beberapa sumber terpercaya juga merupakan keterampilan penting.
3. Mengembangkan keterampilan dalam menafsirkan dan membuat konten media: Siswa perlu memahami bagaimana konten media dibuat dan bagaimana unsur-unsur seperti *framing*, *agenda-setting*, dan bias dapat memengaruhi pesan yang disampaikan. Melibatkan siswa dalam proyek pembuatan media, seperti membuat video dokumenter atau kampanye media sosial, dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses produksi media dan etika yang terlibat.

C. Menumbuhkan Empati dan Perspektif yang Beragam

Dalam iklim politik yang semakin terpolarisasi, mengembangkan empati dan apresiasi terhadap keragaman perspektif menjadi semakin penting. Pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan peran kunci dalam menumbuhkan sikap dan nilai ini melalui berbagai strategi, seperti:

1. Mengekspos siswa pada berbagai sudut pandang dan pengalaman: Guru dapat menggunakan bahan ajar yang menyajikan berbagai perspektif tentang isu-isu sosial dan politik, serta mendorong siswa untuk terlibat dengan narasi dan pengalaman orang-orang dari berbagai latar belakang. Teknik seperti *Jigsaw Classroom* atau kegiatan bermain peran dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih empatik tentang perspektif yang berbeda.
2. Mendorong dialog yang terbuka dan saling menghormati: Menciptakan ruang kelas yang aman dan inklusif di mana siswa merasa nyaman untuk mengekspresikan pandangan mereka dan mendengarkan orang lain dengan hormat sangat penting untuk menumbuhkan empati dan pemahaman. Guru

dapat memodelkan keterampilan mendengarkan aktif dan fasilitasi dialog yang konstruktif, serta menetapkan pedoman yang jelas untuk diskusi yang saling menghormati.

3. Mempromosikan pemahaman antarbudaya dan inklusi sosial: Melibatkan siswa dalam kegiatan dan proyek yang mempromosikan pemahaman antarbudaya dan inklusi sosial dapat membantu menumbuhkan rasa hormat dan apresiasi terhadap keragaman. Ini dapat mencakup pertukaran budaya, layanan masyarakat, atau kolaborasi dengan organisasi lokal yang bekerja untuk keadilan sosial.

Dalam menerapkan strategi-strategi ini, penting bagi guru untuk secara berkala merefleksikan dan menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kebutuhan dan konteks siswa yang beragam. Melibatkan siswa sebagai mitra aktif dalam proses pembelajaran, serta memanfaatkan teknologi dan sumber daya digital secara efektif, juga dapat meningkatkan relevansi dan dampak pendidikan kewarganegaraan.

Meskipun tidak ada solusi yang mudah untuk tantangan yang ditimbulkan oleh era *post-truth*, pendidikan kewarganegaraan yang efektif memiliki potensi untuk membentuk generasi warga negara yang lebih terdidik, terlibat, dan tangguh. Dengan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, literasi media, dan empati, siswa akan lebih siap untuk navigasi dalam lanskap informasi yang kompleks, terlibat dalam dialog yang konstruktif, dan berkontribusi secara positif terhadap masyarakat demokratis.

4. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi

Meskipun pendidikan kewarganegaraan memainkan peran yang sangat penting dalam membekali warga negara di era *post-truth*, implementasi pendekatan dan strategi pengajaran yang efektif tidak lepas dari berbagai tantangan. Namun, setiap tantangan juga menyajikan peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi beberapa tantangan utama dalam menerapkan pendidikan kewarganegaraan yang efektif, serta peluang untuk memperkuat dan meningkatkan dampaknya.

A. Tantangan dalam Menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan yang Efektif

1. Keterbatasan waktu dan sumber daya: Salah satu tantangan utama dalam menerapkan pendidikan kewarganegaraan yang efektif adalah keterbatasan waktu dalam kurikulum yang sudah padat dan tuntutan yang bersaing dari berbagai mata pelajaran. Guru seringkali merasa kesulitan untuk menemukan waktu yang cukup untuk mengeksplorasi isu-isu kewarganegaraan secara mendalam atau menerapkan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti akses ke teknologi atau bahan ajar yang berkualitas, juga dapat menjadi hambatan (Peterson & Bentley, 2020).
2. Resistensi terhadap perubahan dalam praktik pengajaran: Menerapkan pendekatan pengajaran baru atau strategi pedagogis yang inovatif dapat

menimbulkan resistensi dari beberapa guru yang mungkin merasa nyaman dengan metode tradisional. Keengganan untuk keluar dari zona nyaman atau kekurangan waktu dan dukungan untuk pengembangan profesional dapat menghambat adopsi praktik-praktik terbaik dalam pendidikan kewarganegaraan (Buchanan & Kaye, 2022).

3. Kompleksitas isu-isu kontemporer yang dihadapi: Era *post-truth* ditandai dengan isu-isu yang sangat kompleks dan dinamis, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, atau polarisasi politik. Mengajarkan topik-topik ini secara efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam, keterampilan pedagogis yang kuat, dan kemampuan untuk mengelola diskusi yang sensitif. Guru mungkin merasa kurang percaya diri atau kurang siap untuk mengatasi kompleksitas ini di dalam kelas (Heggart, 2021).

Berdasarkan data di atas, tantangan dalam menerapkan pendidikan kewarganegaraan yang efektif terletak pada keterbatasan waktu dan sumber daya, yang dimana keterbatasan waktu dalam kurikulum yang sudah padat dan tuntutan yang bersaing dari berbagai mata pelajaran. Kemudian, resistensi terhadap perubahan dalam praktik pengajaran, yang dimana menerapkan pendekatan pengajaran baru atau strategi pedagogis yang inovatif dapat menimbulkan resistensi dari beberapa guru yang mungkin merasa nyaman dengan metode tradisional. Selanjutnya, kompleksitas isu-isu kontemporer yang dihadapi, yang dimana era *post-truth* ditandai dengan isu-isu yang sangat kompleks dan dinamis, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, atau polarisasi politik. Menjadi sebuah tantangan untuk mengajarkan topik-topik ini secara efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam.

B. Peluang untuk Memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan

1. Kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya: Tantangan era *post-truth* menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pendidikan kewarganegaraan. Membangun kemitraan yang kuat antara sekolah, organisasi masyarakat, media, dan lembaga pemerintah dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan menyediakan sumber daya dan keahlian tambahan. Misalnya, kolaborasi dengan organisasi fact-checking atau outlet media lokal dapat memberikan wawasan praktis tentang literasi media dan verifikasi informasi (Ghosh & Jing, 2020).
2. Pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pembelajaran: Kemajuan teknologi juga menyajikan peluang yang menarik untuk meningkatkan relevansi dan dampak pendidikan kewarganegaraan. Mengintegrasikan alat dan platform digital, seperti media sosial, aplikasi pembelajaran interaktif, atau kursus online, dapat membantu menjangkau dan melibatkan siswa dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Teknologi juga dapat memfasilitasi kolaborasi, pertukaran ide, dan akses ke sumber daya pembelajaran yang lebih luas (Henderson & Tudball, 2019).

3. Pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru: Investasi dalam pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan dampak pendidikan kewarganegaraan. Menyediakan pelatihan, lokakarya, dan peluang untuk berbagi praktik terbaik dapat membantu guru tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru, mengasah keterampilan pedagogis mereka, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam mengatasi isu-isu kompleks. Pengembangan profesional juga dapat mendorong budaya inovasi dan perbaikan terus-menerus dalam praktik pengajaran (Buchanan & Kaye, 2022).

Berdasarkan data di atas, beberapa peluang untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan diantaranya kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yang dimana tantangan era *post-truth* menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pendidikan kewarganegaraan. Membangun kemitraan yang kuat antara sekolah, organisasi masyarakat, media, dan lembaga pemerintah dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan menyediakan sumber daya dan keahlian tambahan. Kemudian, pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pembelajaran, yang dimana kemajuan teknologi juga menyajikan peluang yang menarik untuk meningkatkan relevansi dan dampak pendidikan kewarganegaraan. Mengintegrasikan alat dan platform digital, seperti media sosial, aplikasi pembelajaran interaktif, atau kursus online, dapat membantu menjangkau dan melibatkan siswa dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Selanjutnya, pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru, yang dimana investasi dalam pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan dampak pendidikan kewarganegaraan.

Guna memanfaatkan peluang-peluang ini, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, pemimpin sekolah, guru, orang tua, dan siswa sendiri. Menciptakan visi bersama dan komitmen yang kuat terhadap pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas tinggi sangat penting untuk mengatasi tantangan dan mewujudkan potensi penuhnya. Selain itu, penting juga untuk secara berkala mengevaluasi dan merefleksikan efektivitas pendekatan dan strategi pengajaran, serta bersedia untuk menyesuaikan dan berinovasi sesuai kebutuhan. Mengumpulkan data, mencari umpan balik dari siswa dan pemangku kepentingan, serta berbagi wawasan dan pelajaran yang dipetik dapat membantu meningkatkan praktik secara terus-menerus.

Dengan menghadapi tantangan secara proaktif dan memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan dan inovasi, kita dapat memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan membekali generasi muda dengan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi yang mereka butuhkan untuk menjadi warga negara yang terdidik, terlibat, dan tangguh dalam era *post-truth*. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi dengan upaya kolaboratif, dedikasi, dan komitmen terhadap perbaikan terus-menerus, kita dapat membuat kemajuan yang berarti dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

Pembahasan

Era *post-truth*, yang ditandai dengan meningkatnya penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, pengaruh emosi dan keyakinan pribadi dalam pengambilan keputusan, serta menurunnya kepercayaan terhadap lembaga dan otoritas tradisional, telah muncul sebagai salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi masyarakat demokratis saat ini (Kavanagh & Rich, 2018). Fenomena ini menimbulkan ancaman serius terhadap diskursus publik yang berbasis fakta, meningkatkan polarisasi politik, dan melemahkan integritas proses demokrasi (Lewandowsky, Ecker, & Cook, 2017). Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran yang sangat penting dalam membekali warga negara dengan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang diperlukan untuk bernavigasi dalam lanskap informasi yang kompleks dan sering kali membingungkan (Mihailidis & Viotty, 2017).

Menurut *Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority (ACARA)* di Australia pentingnya pendidikan kewarganegaraan (*Civics Social Studies*) dalam menghadapi tantangan era *post-truth* semakin diakui. Era *post-truth* merupakan periode di mana fakta-fakta objektif kurang berpengaruh dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan di Australia adalah untuk mengembangkan warga negara yang aktif, terlibat, dan bertanggung jawab, yang memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem politik dan pemerintahan, hak dan tanggung jawab warga negara, serta nilai-nilai demokratis seperti kesetaraan, keadilan, dan kebebasan (Ghosh & Jing, 2020). Dalam konteks era *post-truth*, pendidikan kewarganegaraan juga semakin menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis, literasi media, dan ketahanan terhadap informasi yang menyesatkan (Henderson & Tudball, 2019).

Kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Australia dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan ini melalui integrasi ke dalam berbagai mata pelajaran dan penekanan pada pengembangan kompetensi inti, seperti pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas (Heggart, 2021). Pendekatan pengajaran juga menekankan pembelajaran aktif dan partisipatif, dengan siswa didorong untuk terlibat dalam diskusi, debat, dan proyek-proyek kolaboratif yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi isu-isu kewarganegaraan secara mendalam (Peterson & Bentley, 2020).

Berbagai strategi pengajaran diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan di Australia untuk membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi era *post-truth*. Pengembangan keterampilan berpikir kritis menjadi prioritas utama, dengan siswa diajarkan cara mengevaluasi sumber informasi, menganalisis argumen dan bukti secara kritis, serta terlibat dalam diskusi yang mendalam dan reflektif (Buchanan & Kaye, 2022). Mempromosikan literasi media dan digital juga menjadi penting, dengan siswa diajarkan cara mengidentifikasi berita palsu, menggunakan sumber informasi yang kredibel, serta menafsirkan dan membuat konten media secara bertanggung jawab (Notley & Dezuanni, 2019). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga berupaya menumbuhkan empati dan apresiasi terhadap keragaman perspektif melalui eksposur terhadap berbagai sudut pandang, dialog yang terbuka dan saling

menghormati, serta promosi pemahaman antarbudaya dan inklusi sosial (Halafoff et al., 2020).

Meskipun demikian, implementasi pendidikan kewarganegaraan yang efektif di Australia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu dan sumber daya, resistensi terhadap perubahan dalam praktik pengajaran, serta kompleksitas isu-isu kontemporer yang dihadapi (Peterson & Bentley, 2020). Namun, tantangan-tantangan ini juga menyajikan peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pembelajaran, serta pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru merupakan beberapa strategi kunci untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan di era *post-truth* (Ghosh & Jing, 2020; Henderson & Tudball, 2019).

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang menumbuhkan disposisi dan nilai-nilai yang mendukung partisipasi yang bermakna dalam kehidupan publik, seperti menghargai keragaman, toleransi, empati, serta komitmen terhadap kebenaran, transparansi, dan akuntabilitas (Reichert & Print, 2018). Dengan menanamkan nilai-nilai ini pada generasi muda, bersamaan dengan keterampilan yang diperlukan untuk berpikir kritis dan terlibat secara konstruktif, pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan peran kunci dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap tantangan era *post-truth* (Mihailidis & Viotty, 2017).

Penting juga untuk mengakui bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Keluarga, media, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah semuanya memiliki peran dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku warga negara (Reichert & Print, 2018). Dengan bekerja sama dan saling melengkapi, kita dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pembelajaran dan praktik kewarganegaraan yang positif. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan harus responsif terhadap perubahan zaman dan tantangan baru yang muncul, ini membutuhkan fleksibilitas, adaptabilitas, dan komitmen terhadap pembelajaran dan inovasi yang berkelanjutan (Heggart, 2021). Dengan terus mengevaluasi dan menyempurnakan pendekatan, berbagai praktik terbaik, dan belajar dari pengalaman satu sama lain, kita dapat memastikan bahwa pendidikan kewarganegaraan tetap relevan dan efektif dalam membekali warga negara untuk realitas yang terus berubah di era *post-truth*. Dalam menghadapi tantangan era *post-truth*, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Ini adalah investasi dalam masa depan demokrasi dan dalam kapasitas warga negara untuk berpikir kritis, terlibat secara aktif, dan bertindak dengan integritas (Ghosh & Jing, 2020). Dengan komitmen yang kuat dan upaya kolaboratif, kita dapat memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan membangun fondasi yang kuat untuk masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan tahan terhadap tantangan era *post-truth*.

SIMPULAN

Era *post-truth* saat ini menciptakan tantangan bagi demokrasi dan diskursus publik dengan meningkatnya informasi yang menyesatkan, pengaruh emosi dalam pengambilan keputusan, dan menurunnya kepercayaan terhadap otoritas tradisional. Peran krusial pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan di Australia dalam menanggapi urgensi situasi tersebut. Meskipun terdapat tantangan pada keterbatasan waktu dan sumber daya, resistensi terhadap perubahan dalam praktik pengajaran, dan kompleksitas isu-isu kontemporer yang dihadapi, beberapa peluang untuk memperkuat diantaranya kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pembelajaran, serta pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru sebagai strategi kunci untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menyoroti peran vital pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat ketahanan demokrasi dan meningkatkan kualitas partisipasi warga negara dalam menghadapi tantangan era *post-truth* di Australia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, F. A. (2019). Implementasi kompetensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan globalisasi. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 2(2), 184–200. <https://doi.org/10.47080/propatria.v2i2.593>
- Banks, J. A. (2008). *Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in A Global Age. Educational Researcher*, 37(3), 129-139.
- Buchanan, R., & Kaye, D. (2022). *Teaching For Active and Informed Citizenship in A Post-Truth World. The Social Educator*, 40(1), 3-15.
- Buckingham, D. (2019). *The media education manifesto*. Polity Press.
- Erlande, R., & Sapriya. (2022). *Analysis of The Problems Civic Education Teachers in The Development of Learning Media. International Conference of Humanities and Social Science (ICHSS)*, 798–803. Retrieved from <https://programdokterpbiuns.org/index.php/proceedings/article/view/109>
- Erlande, R. (2022). *Analysis of the Problems Civic Education Teachers in the Development of Learning Media. International Conference of ...*, 798–803. <http://www.programdokterpbiuns.org/index.php/proceedings/article/view/109%0A> <http://www.programdokterpbiuns.org/index.php/proceedings/article/download/109/125>
- Erlande, R., & Chotimah, U. (2023). *The Effect of the Application of the Treffinger Model on Creative Thinking Ability in Pancasila and Civic Education Class VII SMPN 17 Palembang (Vol. 1)*. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1_55
- Ghosh, R., & Jing, Y. (2020). *Fake News and Post-Truth: Challenges For Civic Education. Education, Citizenship and Social Justice*, 15(3), 209-222. <https://doi.org/10.1177/1746197920912897>
- Giroux, H. A. (2021). *Critical Pedagogy in Uncertain Times: Hope and possibilities*. Palgrave Macmillan.

- Halafoff, A., Lam, K., Bouma, G., & Barton, G. (2020). *Worldviews Education: Cosmopolitan Peacebuilding and Preventing Violent Extremism*. *Journal of Beliefs & Values*, 41(3), 381-395. <https://doi.org/10.1080/13617672.2019.1600283>
- Heggart, K. (2021). *Navigating The Post-Truth Landscape: Strategies for Teaching Critical Thinking in Citizenship Education*. *The Social Studies*, 112(3), 113-122. <https://doi.org/10.1080/00377996.2021.1884678>
- Henderson, D., & Tudball, L. (2019). *Confronting The Challenges of A Post-Truth World: Citizenship Education in Australia*. *The Journal of Social Studies Research*, 43(4), 347-358. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2019.01.002>
- Istianah, A., & Komalasari, K. (2023). Dampak Isu Global Terhadap Jati Diri Bangsa dan Karakter ke Indonesiaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 4(1), 96-106. <https://doi.org/10.21154/asanka.v4i1.5576>
- Jannah, F., & Sulianti, A. (2021). Perspektif Mahasiswa Sebagai *Agen of Change* melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 2(2), 181-193. <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i2.3193>
- Kavanagh, J., & Rich, M. D. (2018). *Truth decay: An initial exploration of the diminishing role of facts and analysis in American public life*. Rand Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2314.html
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K., & Cook, J. (2017). *Beyond Misinformation: Understanding and Coping with The "Post-Truth" Era*. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353-369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>
- Mihailidis, P., & Viotty, S. (2017). *Spreadable Spectacle in Digital Culture: Civic Expression, Fake News, and The Role of Media Literacies In "Post-Fact" Society*. *American Behavioral Scientist*, 61(4), 441-454. <https://doi.org/10.1177/0002764217701217>
- Mulyani, H., Komalasari, K., Permatasari, M., Bribin, M. L., Suriaman. (2024). Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan Global di Era Abad 21: Analisis Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 21(1), 88-101. <https://doi.org/10.24114/jk.v21i1.55115>
- Murdiono, M., Suyato, Rahmawati, E. N., & Aziz, M. A. (2020). *Developing an Android-Based Mobile Application for Civic Education Learning*. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 14(16), 180-193. <https://doi.org/10.3991/ijim.v14i16.14967>
- Notley, T., & Dezuanni, M. (2019). *Advancing Children's News Media Literacy: Learning from The Practices and Experiences of Young Australians*. *Media, Culture & Society*, 41(5), 689-707. <https://doi.org/10.1177/0163443718813470>
- Permatasari, M., Hubi, Z. B., Mulyani, H., Insani, N. N., & Bribin, M. L. (2024). Membangun Karakter Warga Negara Digital dan Pendidikan Hukum Global Menuju Indonesia Emas 2045. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2099>
- Permatasari, M., Nurgiansah T. H., Abdulkarim, A., Suriaman., & Prayogi, R. (2023). Analisis Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2278-2285. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5681>

- Peterson, A., & Bentley, B. (2020). *Empowering Young Citizens in A Post-Truth Era: Citizenship Education in Australia*. *Education, Citizenship and Social Justice*, 15(3), 223-237. <https://doi.org/10.1177/1746197920912900>
- Reichert, F., & Print, M. (2018). *Civic Participation of High School Students: The Effect of Civic Learning in School*. *Educational Review*, 70(3), 318-341. <https://doi.org/10.1080/00131911.2017.1316239>
- Rusniati. (2015). Pendidikan Nasional dan Tantangan Globalisasi: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran A. Malik Fajar. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 16(1), 105–128. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/589/492>